

## TAJUK RENCANA

### Merenungkan Perjuangan Pahlawan Kemanusiaan

**KABAR** duka harus dihadapi bangsa ini. Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) untuk pandemi Covid-19 mencatat 115 dokter di Indonesia meninggal akibat Covid-19. Dengan rincian, dokter umum 57, dokter spesialis 51 dan dan tujuh lainnya guru besar. Jumlah ini masih belum mencatat dokter gigi dan perawat yang meninggal akibat Covid-19. (KR, 13/9) Tingginya angka ini membuat Indonesia disebut Amnesty Internasional yang dikutip pelbagai media sebagai negara dengan angka kematian tenaga kesehatan terbanyak, semasa wabah ini.

Rentetan duka ini terjadi sejak Maret, 6 bulan silam. Angka gugurnya para dokter terus bergerak dan merangkak naik jumlahnya, mengiring terus meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar covid. Dan update data resmi PB IDI ini seakan menjadi jawaban jelas bagi yang sempat meragukan angka yang dilansir IDI di masa pandemi Covid-19.

Data ini mengharuskan kita memahami ada kerugian besar Bangsa Indonesia. Hanya dalam waktu 6 bulan sejak wabah terjadi, Indonesia sudah kehilangan 115 dokter. Sebuah angka yang sangat luar biasa. Merujuk data Kementerian Kesehatan 2019, jumlah dokter umum dan spesialis yang tersebar seluruh provinsi di Indonesia sebanyak 90.448, sedangkan dokter gigi 16.559. Sementara jumlah penduduk Indonesia 267 juta.

Berdasar data Bank Dunia rasio dokter di Indonesia juga masih sangat rendah, hanya 0,4 per 1.000 penduduk. Atau, hanya ada 4 dokter untuk melayani 10 ribu orang. Sungguh miris, di Asia Tenggara, angka ini hanya menang dari Kamboja. Artinya, kehilangan 115 dokter tentu sangat berarti bagi

sekitan ratus ribu penduduk. Dibandingkan rasio dokter di Malaysia yang 15 dokter per 1.000 penduduk, angkanya menjadi jauh. Sementara Indonesia juga masih menghadapi masalah persebaran dokter yang tidak merata.

Memang tidak semudah membalikkan tangan menghadirkan sseorang dokter apalagi spesialis. Untuk mendidik seorang dokter umum, secara normal memerlukan waktu sekitar 6 tahun. Biaya pendidikan total minimal Rp 130 juta meski dalam realita angka tersebut bisa berlipat. Ini tidak termasuk biaya masuk ketika diterima di Fakultas Kedokteran. Belum lagi untuk menjadi seorang spesialis, perlu waktu selama 8 semester, 4 tahun. Artinya, menjadi seorang dokter spesialis perlu waktu paling tidak 10 tahun. Dan biayanya? Tentu lebih banyak lagi dari menjadi seorang dokter umum.

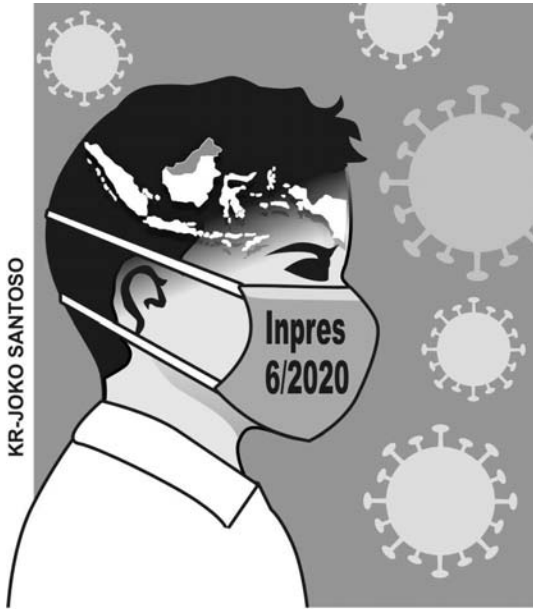
Gugurnya 115 dokter ini adalah sebuah kerugian Indonesia juga dalam hal investasi sumberdaya manusia (SDM) bidang kesehatan. Dan sejatinya saat ini kita menghadapi problem serius. Bergugurnya tenaga kesehatan bisa berdampak pada penurunan angka kesembuhan. Padahal, wabah belum selesai. Laju persebaran masih belum bisa dikendalikan. Sementara, kita sudah kehilangan banyak dokter dan tenaga kesehatan yang idealnya merupakan garda terakhir namun harus menjadi garda terdepan.

Artinya, di masa depan persoalan serius ini harus mendapat perhatian semua pihak : pemerintah dan juga masyarakat. Sesuai porsi, keduanya harus menyadari bila masalah promotif dan preventif kesehatan sangat penting dan utama. Mari kita pikirkan, sekaligus merenungkan perjuangan serta dedikasi para Pahlawan Kemanusiaan Covid-19. □

# Mencermati Penerapan Inpres 6/2020

## Bagong Suyanto

belum lama ini sebanyak 54 warga yang tidak tidak mematuhi protokol kesehatan dihukum berdo'a dan merenung di makam pasien Covid-19 di Pemakaman Praloyo di kawasan Jalan Lingkar Timur Sidoarjo-Jawa Timur. Di DKI Jakarta, sanksi sosial yang diberlakukan bagi pelanggar protokol kesehatan adalah menyuruh pelanggar memilih sanksi, mulai dari melakukan pengabdian



masyarakat, membayar denda atau berbaring di peti mati. Berbagai bentuk hukuman yang unik itu diberlakukan, selain untuk menimbulkan efek jera, juga sebagai referensi bagi warga masyarakat lain agar tidak melakukan tindakan serupa.

Apakah dengan menerapkan berbagai ancaman sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan lantas perilaku masyarakat menjadi lebih tertib dan disiplin?

### Pendekatan Insentif

Idealnya, sebuah aturan seperti protokol kesehatan ditaati masyarakat dan dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri (*self-enforcing*). Namun, pada individu-individu tertentu atau pada waktu-

waktu, daya *self-enforcing* dari aturan ini seringkali lemah. Dalam berbagai kasus, sering terjadi sebagian masyarakat justru merasa bahwa dengan mentaati protokol kesehatan itu malahan tidak *rewarding*; bahkan sebaliknya mengalami kerugian.

Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi protokol kesehatan dia malahan akan bisa memperoleh sesuatu *reward* atau sesuatu keuntungan lain yang lebih besar. Maka di dalam hal demikian *enforcement* demi tegaknya norma, harus dijalankan dengan sarana sesuatu kekuatan dari luar.

Ketika protokol kesehatan tidak *self-enforcing*, sebagai gantinya harus dipertahankan petugas kontrol sosial. Dengan cara mengancam atau membentangkan sanksi-sanksi kepada mereka-mereka yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma. Pada titik ini, jangan heran jika yang terjadi adalah adu stamina dan 'main kucing-kucingan'.

Di luar soal ancaman sanksi, untuk menegakkan protokol kesehatan dan menjamin penerapan Inpres 6/2020 dapat berjalan efektif, ada baiknya jika pemerintah juga mengatur pendekatan yang memberi insentif bagi masyarakat yang telah menjalankan protokol kesehatan. Dengan mengkombinasikan pendekatan yang *siftnya* mengancamkan sanksi dan pendekatan yang berbasis insentif, mungkin penerapan Inpres No 6/2020 akan dapat berjalan lebih efektif.

*\*) Prof Dr Bagong Suyanto, Sosiolog, Guru Besar FISIP Universitas Airlangga*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini@kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## N-Ach, Menahan Laju Perkawinan Anak

**DISPENSASI** perkawinan anak bukanlah satu-satunya alasan tingginya perkawinan anak. Dispensasi yang diberikan hakim berdasarkan Undang-undang Perkawinan merupakan hilir dari kompleksitas persoalan perkawinan anak. Banyak persoalan hulu yang menjadi sebab masih tingginya perkawinan anak, sehingga peran hakim dan undang-undang belum tentu muja'rah tanpa berjalan usaha dari hulu.

Ada beberapa sebab mengapa perkawinan anak masih terjadi. Sebab-sebab dimaksud dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua, yakni: (1) sebab dari anak, dan (2) sebab di luar anak. Adapun sebab dari anak dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: (1) karena tidak sekolah, dan (2) karena anak melakukan hubungan seksual, bahkan karena hamil. Dua sebab ini saling berhubungan.

### Cukup Mandiri

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan anak dalam dua bentuk. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja anak sudah merasa cukup mandiri. Sehingga merasa mampu untuk menghidupi keluarga. Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah. Perlu dimaklumi anak yang masuk perguruan tinggi yang masuk usia kawin, hanya 7-8% dari seluruh penduduk Indonesia.

Adapun sebab di luar anak adalah pemahaman agama. Dalam kasus ini orangtua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah, bisa jatuh zina. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul perkawinan anak agar mereka

## Khoiruddin Nasution

terhindar dari perbuatan tersebut.

Alasan ekonomi sebagai faktor perkawinan anak dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orangtua yang tidak mendukung anak sekolah membuat anak bekerja dan merasa mandiri, kemudian nikah. Bentuk kedua adalah anak menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan. Alasan adat atau budaya muncul dalam bentuk perjodohan atau khawatir anak disebut perawan tua.

### Memiliki N-Ach

*Need For Achievement* atau N-Ach diperkenalkan David McClelland (1987), ahli psikologi sosial. Intinya menekankan dorongan untuk berprestasi. Orang yang memiliki N-Ach tinggi, memiliki semangat dan kebutuhan untuk berprestasi. Kepuasan bekerja bukan hanya pada imbalan hasil kerja, tetapi karena hasil kerja yang baik, bermutu tinggi dan dapat menyelesaikan tantangan berat.

Dengan menumbuhkan *need for achievement* sejak dari pendidikan menengah bawah (SLTP) diharapkan anak-anak termotivasi bekerja keras, berprestasi dan mampu menyelesaikan tantangan berat. Dengan motivasi ini pada gilirannya dapat menunda perkawinan mereka. Untuk lahir dan tumbuhnya N-Ach, idealnya dilakukan guru di sekolah dan orangtua di rumah. Namun peran orangtua sangat tipis dapat diharapkan, karena kompetensi yang lemah, kecuali orangtua terdidik. Karena itu peran sekolah harus maksimal, dan perlu masuk kurikulum.

Pemerintah telah menyediakan berbagai program dalam rangka membangun ketahanan keluarga. Baik yang bersifat persiapan perkawinan dengan kursus pra-nikah, kursus calon pengantin atau kursus sejenisnya, maupun semasa perkawinan. Demikian juga ada penyuluhan dan program keluarga sakinah di bawah Kementerian Agama. Sejalan dengan itu ada juga penyuluhan dan program keluarga sejahtera di bawah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN.

Dengan demikian tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa banyaknya permohonan dispensasi kawin menunjukkan belum berjalannya peran di hulu. Karena itu peran hulu dan hilir sama-sama membutuhkan pembenahan agar masing-masing memainkan peran secara baik dan optimal, sehingga perkawinan anak pun dapat diatasi. □

*\*) Prof Dr Khoiruddin Nasution, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengajar Fak. Hukum & MSI UII Yogyakarta, serta Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia*

## Pojok KR

PB IDI umumkan, 115 dokter meninggal akibat Covid-19

-- Mereka adalah pahlawan kemanusiaan \*\*\*

ASN Wonosobo kembali kerja di rumah

-- Tak ada lagi alasan gaptak \*\*\*

Yogya cari tempat isolasi Covid-19

-- Pasti perlu dokter dan tenaga kesehatan pula

*Berabe*

## Kedaulatan Rakyat

**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi ( 2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiw, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Aftiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono., **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklan@krk23@yahoo.com, iklan@krk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga..Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**SIUPP** (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

**Penerbit:** PT-PB Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. **Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

**Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.